PENGARUH *PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMITMEN ORGANISASI* DAN *SISTEM PENGENDALIAN* INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(Studi empiris pada SKPD Kota Solok)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Oleh :

REZA ILHAM PUTRA

2016/16043113

Dosen Pembimbing :
HALMAWATI, SE, M. Si

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMITMEN ORGANISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)

Nama	: Reza Ilham Putra
NIM / TM	: 16043113 / 2016
Program Studi	: Akuntansi
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi

Padang, 9 November 2021

Disetujui Oleh:

Mengetahui,	
Ketua Program Studi Akuntansi	Dosen Pembimbing
Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D	Halmawati, SE, M. Si
NIP. 19800103 200212 2 001	NIP. 19740303 200812 2 001

Scanned with CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul	:	**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi empiris pada SKPD Kota Solok)**
Nama	:	**Reza Ilham Putra**
NIM / TM	:	**16043113 / 2016**
Program Studi	:	**Akuntansi**
Keahlian	:	**Akuntansi Sektor Publik**
Fakultas	:	**Ekonomi**

Padang, 9 November 2021

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	TandaTangan
1.	Ketua	Halmawati, SE, M. Si	1.
2.	Anggota	Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	2.
3.	Anggota	Herlina Helmy, SE, M. SA	3.

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Reza Ilham Putra
NIM/Tahun masuk	; 16043113/2016
Tempat/Tgl Lahir	: Solok/23 Desember 1997
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Perumnas Nusa Indah 1, Blok A, No.4
No. Hp	: 081270522010
Judul Skripsi	: Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (*Studi empiris pada SKPD Kota Solok)*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah aslindan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP atau di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusa, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikaskan kecuali secara eksplisit dicantumkan seebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh pembimbing. Tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah dieproleh karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 9 November 2021

METERAI TEMPEL

Reza Ilham Putra
NIM. 16043113

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Reza Ilham Putra. (16043113/2016). "Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Solok)". Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing : Halmawati, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 24 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok dengan jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 48 kuesioner dan masing-masing SKPD terdiri dari 2 sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel SAKD berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. Variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok).** Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Halmawati SE, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis.
3. Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc selaku dosen penelaah yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Herlina Helmy, SE, M.S.Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Idris, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Orang tua tersayang Asmiardi. SP dan Hasnibar. Spd.SD, kakak Amelia Aurantika. A.Md,Keb dan adik Merisa Laras Putri yang selalu memberikan motivasi, perhatian, nasihat, doa dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Kandung Akuntasi kelas D 2016 diantaranya Vega, LailaPut, Linia, Inul, Irfan, Iqbal, Isan, Ami, Mega, Ike, Putri Zainiah, Putri Rahmawati, Rahmat, Rani, Ranti, Rega, Resti, Reza Purnama, Risti, Ririn, Dio, Rizki, Vivi, Wahyu dan Zamratul yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan bantuan serta semangat kepada penulis.
11. Keluarga Kandung Akuntansi tahun masuk 2016 yag telah berjuang bersama dan memberikan bantuan serta semangat kepada penulis.
12. Abang Rizki Anshari, SE selaku admin prosi akuntansi yang telah banyak membantu penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu- persatu.

DAFTAR ISI

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Manfaat Penelitain 10

BAB II KAJIAN TEORI, HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL 11

2.1 Kajian teori 11

2.1.1 Agency Theory 11

2.1.2 Laporan keuangan 12

2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 14

2.1.4 Komitmen organisasi 15

2.1.5 Pengendalian *intern* 16

2.2 Penelitian terdahulu 17

2.3 Hubungan antar variabel 21

2.4 Pengembangan Hipotesis 23

2.5 Pengukuran Definisi Operasional dan Indikator 24

2.6 Kerangka Konseptual 26

BAB III METODE PENELITIAN 27

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 27
3.2 Lokasi Penelitian 27
3.3 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 28
3.4 Unit Analisis 29
3.5 Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data 29
3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 30
3.7 Analisis Data 33
3.8 Uji Asumsi Klasik 34
3.9 Uji Hipotesis 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
4.1 Hasil Penelitian 37
4.1.1 Deskripsi Data 37
4.1.2 Gambaran Umum Responden 39
4.1.3 Statistik Deskriptif 42
4.1.4 Hasil Uji Kualitas Data 46
4.1.4.1 Hasil Uji Validitas 46
4.1.4.2 Hasil Uji Realibilitas 47
4.1.5 Hasil Uji Asumsi Dasar 47
4.1.5.1 Hasil Uji Normalitas 47
4.1.6 Hasil Uji Asumsi Klasik 48
4.1.6.1 Hasil Uji Multikolinearitas 48
4.1.6.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 49
4.2 Hasil Uji Hipotesis 49
4.3 Pembahasan 51
4.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 51

4.3.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 52

4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 53

BAB V PENUTUP 55

5.1 Kesimpulan 55

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 55

5.3 Keterbatasan Penelitian 56

5.4 Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka konseptual.....27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Opini audit Pemerintahan Kota Solok tahun 2012 - 2020 5

Tabel 2 Perbandingan penelitian terdahulu 17

Tabel 3 Definisi operasional..... 24

Tabel 4 Distribusi penyebaran kuisioner..... 38

Tabel 5 Tingkat pengembalian kuisioner 39

Tabel 6 Gambaran umum responden 40

Tabel 7 Rata – rata distribusi frekuensi jawaban responden 42

Tabel 8 frekuensi jawaban responden..... 42

Tabel 9 Hasil uji validitas..... 46

Tabel 10 Hasil pengujian reabilitas 47

Tabel 11 Hasil pengujian normalitas 48

Tabel 12 Hasil pengujian multikolinearitas 48

Tabel 13 Hasil pengujian heteroskedastisitas..... 49

Tabel 14 Hasil pengujian hipotesis..... 49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik di beberapa daerah di Indonesia pada beberapa tahun ini mengalami beberapa fenomena yang mana semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Dalam pandangan ekonomi organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Pramudiarta, 2015). Menurut PP 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Pada saat ini tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi sorotan masyarakat dikarenakan maraknya kasus korupsi di pemerintahan yang sulit diberantas ataupun kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah yang banyak merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah diminta keterbukaan terhadap public atas segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Penguatan akuntabilitas dan transparansi sektor public sebagai konsekuensi penting dari kebijakan pemerintah yang relevansinya dapat meningkatkan kualitas

laporan keuangan dan memperkuat pengendalian internal pada organisasi sektor public.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam bidang pengelolaan keuangan Negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat dilakukan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang diterapkan dipemerintahan. Standar akuntansi yang dimaksud yaitu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan tujuan untuk memberikan suatu pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Akuntansi berbasis akrual yang dimaksud ialah, suatu sistem akuntansi dimana transaksi-transaksi ataupun peristiwa ekonomi yang diakui pencatatan dan penyajiannya, berdasarkan waktu terjadinya peristiwa ekonomi tersebut tanpa mempertimbangkan faktor waktu kas.

LKPD merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas, oleh karenanya LKPD tersebut harus berkualitas agar dapat menggambarkan kondisi dan kinerja secara akurat. LKPD dapat dikategorikan berkualitas apabila informasi yang disajikan di dalam LKPD telah memenuhi karakteristik kualitatif. Ketika LKPD telah memenuhi karakteristik kualitatif, maka LKPD tersebut dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan untuk pembuatan keputusan, seperti keputusan perencanaan dan pengendalian keuangan. Karakteristik kualitatif LKPD terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Yohanes Suhardjo: 2019).

Berikut merupakan uraian karakteristik kualitatif LKPD seperti berikut; *pertama* relevan, informasi yang relevan memiliki informasi yang berisikan tentang keputusan pengguna yang mempengaruhi mereka dalam melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa yang akan datang, serta mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Selanjutnya *kedua* ialah andal, keandalan informasi bergantung pada kemampuan informasi dalam menyajikan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pad aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila informasi tersebut dapat diuji kebenarannya, netral, penyajian secara wajar atau jujur (*representational faithfulness)*

Kemudian yang *ketiga* dapat dibandingkan, dapat dibandingkan ini yakninya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dan yang *keempat* dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh seluruh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuailan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pada pengukuran karakteristik kualitatif LKPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan pemerintahan yang memiliki wewenang untuk pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab laporan keuangan, sebagai badan yang memiliki wewenang, terkait LKPD, BPK memiliki 4 tingkatan dalam memberikan opini terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut; *pertama*, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau *Unqualified Opinion)* dimana mempunyai

kriteria diantaranya sistem pengendalian internal memadai dan tidak salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Dengan artian secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan SAKD.

Selanjutnya *kedua*, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP atau *Qualified Opinion)* dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada laporan keuangan, oleh karenanya harus memperhatikan beberapa masalah yang dilampirkan auditor. *Ketiga,* opini Tidak Memberikan Pendapat (TMT atau *Disclaimer Opinion)* opini ini mempunyai suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini oleh auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tidak cukup bukti dan sistem pengendalian internal yang lemah. Dalam kondisi ini auditor tidak dapat memberikan kewajaran laporan keuangan. Kemudian, opini terakhir yakni Tidak Wajar (TW atau *Adverse Opini)* opini ini muncul akibat sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat banyak salah saji pada laporan keuangan yang material, dengan demikian laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini BPK tersebut merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mendapatkan tingkat kepercayaan atas laporan keuangan yang disajikan. Opini ini juga yang akan memproksikan kualitas laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Hasil audit dengan WTP merupakan peringkat kualitas laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif LKPD.

Opini audit yang berhasil didapatkan oleh pemerintah kota Kota Solok mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Semenjak tahun 2012 sampai

dengan 2020, terdapat beberapa opini audit yang pernah di sematkan BPK pada laporan keuangan mereka. Berikut data hasil audit pemerintah kota solok dari tahun 2012 sampai dengan 2020:

Tabel 1
Opini Audit Pemerintah Kota Solok Tahun 2012-2020

No	Kab/Kota	Tahun	Hasil Audit
1	Kota Solok	2012	WTP
2	Kota Solok	2013	WDP
3	Kota Solok	2014	WDP
4	Kota Solok	2015	WDP
5	Kota Solok	2016	WTP
6	Kota Solok	2017	WTP
7	Kota Solok	2018	WTP
8	Kota Solok	2019	WTP

Sumber : www.sumbar.bpk.go.id (Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa laporan keuangan kota solok mengalami penurunan kualitas. Hal ini terjadi pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Selama 3 tahun berturut-turut pemerintah kota solok mendapatkan opini Wajar Dengan Pegecualian. Setelah itu, pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan kembali dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 tahun berturut-turut dimana telah menerapkan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di tahun 2018.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pemerintah Kota Solok. Walaupun telah

mendapatkapan opini WTP, namun pemerintah kota solok mendapatkan beberapa catatan penting dari BPK terkait hal yang harus diperbaiki. Hal ini tentu saja akan berdampak pada hasil audit untuk kedepannya apabila tidak ada perbaikan dari pemerintah daerah. Peneliti bermaksud untuk membuktikan apa saja determinasi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian (Winanti, 2015) menemukan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap opini audit.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik, LKPD dalam pembuatannya menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), SAKD merupakan kumpulan dari subsistem-sitem yang didalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Mahmudi, 2016). Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Rujuk dalam penelitian Yuliani dan Agustini (2016) menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Selanjutnya, ditemukan bahwa komitmen organisasi merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kualitas LKPD. Rujuk dalam penelitian Rahman Arif

(2017) menemukan adanya pengaruh signifikan positif dari komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD. Dengan artian, adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relative lebih tepat. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Semakin baik komitmen pegawai dalam organisasinya maka laporan keuangan yang dibuatpun akan semakin berkualitas (Frasca Ardy Nugroho dkk, 2019)

Kemudian, untuk memberi keyakinan mengenai keteladanan laporan keuangan digunakan sistem pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa "untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan". Peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi , dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan semakin baik sistem pengendalian internal yang ada maka akan menghasilkan pelaporan keuangan yang andal.

Seperti yang telah dikemukakan, kualitas LKPD memiliki urgensi dalam pengambilan keputusan, dengan artian kualitas LKPD memiliki andil penting dan harus diperhatikan, Namun, apabila laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatife berupa, penurunan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana public (pemerintah). Investor takut menanamkan modal karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko investasi, pemberi donor mengurangi atau menghentikan bantuan, kualitas keputusan yang buruk, laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja aktual.

Berdasarkan uraian diatas, menggiring peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan masih terdapat banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan aturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggiring peneliti untuk melakukan penelitiain ini. Rujuk penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) yang menyebutkan bahwa pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAKD, berpengaruh positif tehradap kualitas LKPD. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Suhardjo (2019) menyebutkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena adanya perbedaan factual antara penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah, Dul Muid (2014) dengan Yohanes Suhardjo (2019), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. peneliti ingin melihat bagaimana penerapan

SAKD, Komitmen Organisasi dan Pengendalian internal memiliki pengaruh atau tidak terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota Solok.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota Solok?
2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota Solok?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota Solok?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Kota Solok. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitain

Penelitain ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi semua pihak yang berkepentingan. Manfaat penelitain ini, sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademisi

   Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan literature akuntansi sektor publik terutama dibidang akuntansi pemerintahan, kemudian diharapkan mampu menambah wawasan dan referensi untuk dilakukannya penelitian-penelitian berikutnya di bidang akuntansi sektor publik lainnya.

2. Manfaat bagi praktisi

   Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh dan etika penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

\